

DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM (DAN ANALISIS PENGEMBANGANNYA)

Rahmat Hidayat¹, Ridhatul Husna², Martin Kustati³, Nana Sepriyanti⁴

¹rahmat.hidayat@uinib.ac.id | Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

²ridhatulhusna15@gmail.com | Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

³martin.kustati@yahoo.com | Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

⁴nanasepriyanti@uinib.ac.id | Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Histori Naskah

Diajukan : 07 / 05 / 2023

Disetujui : 04 / 06 / 2023

Dipublikasi : 12 / 06 / 2023

ABSTRACT

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang paling banyak dianut pada masa ini. Saat ini, banyak sekali Negara yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hukum. Dalam Islam, demokrasi telah diajarkan Rasulullah SAW. Yaitu dengan musyawarah. Contohnya, pada saat perang badar, beliau mendengarkan saran sahabatnya mengenai lokasi perang walaupun itu bukan pilihan yang diajukan olehnya. Rasulullah pun mulai sering melakukan musyawarah bersama sahabat-sahabatnya untuk memutuskan sesuatu. Namun yang terjadi saat ini, banyak orang yang menganggap bahwa sistem demokrasi diadaptasi dari Negara-negara barat, sehingga sistem demokrasi dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Musyawarah dalam Islam.

Kata Kunci : Demokrasi, Pendidikan Islam, Analisis Pengembangan

PENDAHULUAN

Peranan pendidikan dalam kehidupan kenegaraan akan banyak memberikan dimensi pembangunan karakter bangsa (*Nations Character bulding*) aktualisasi karakter masyarakat dapat membentuk nilai-nilai budaya yang tumbuh pada komunitas lingkungan sosial politik, baik dalam bentuk berpikir, berinisiatif dan beraneka ragam hak asasi manusia. Dengan demikian pendidikan senantiasa



melahirkan nilai tata kehidupan masyarakat dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh suatu pemerintahan.

Pada kondisi Negara yang memiliki masyarakat heterogenitas, cenderung menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Konteks demokrasi secara sederhana menunjukkan adanya pemerintahan dan rakyat oleh rakyat. Prinsip utama dalam menerapkan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual terhadap upaya untuk menikmati hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara sehingga pada gilirannya dapat membentuk kondisi community development pada nilai-nilai keberagaman, baik berpikir, bertindak berpendapat maupun berkreasi agar semakin demokratis pelaksanaan pendidikan suatu negara akan memberikan implikasi pada pendidikan paraf kepedulian masyarakat terhadap hak dan kepeduliannya (Ali Maschan Moesa, 2012). Impact yang sangat kuat dari penerapan demokrasi pendidikan yaitu berkembangnya keberagaman pola pikir masyarakat, kreatifitas dan daya inovasi yang tinggi.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Yang memperoleh sumber data dari kepustakaan. Data kepustakaan yang digunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan demokrasi pendidikan Islam dan analisis pengembangannya. Pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi dengan langkah mengumpulkan sekumpulan data dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten (J.Moleong, 2013). Metode kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membandingkannya (Hadari Nawawi, 1996).

HASIL

A. Hakikat Demokrasi Pendidikan Islam

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata “ *demos*” dan “*cratos*”, *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintah. Maka demokrasi adalah pemerintahan didalam rakyat. Menurut Dede Rosyada yang istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik , yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme



dalam lembaga pendidikan, namun secara substansif demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi (Dede Rosyada, 2005).

Sugarda Purbakawadja, yang dikutip oleh Ramayulis memberikan definisi bahwa demokrasi pendidikan, adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil (Ramayulis, 2015).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak serta perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan.

2. Pengertian Pendidikan Islam

Dalam istilah yang sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah yang dewasa. Menurut Darwyan Syah Pendidikan merupakan tuntutan segala kodrat yang terdapat dalam diri anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki (Darwyan Syah, dkk, 2006).

Menurut Al-Abrasyi yang dikutip oleh ramayulis yaitu memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik lisan maupun tulisan (Ramayulis, 2015).

Sedangkan menurut marimba yang dikutip oleh ramayulis memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam (Ramayulis, 2015).

Dilihat dari pemikiran marimba dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat melatih jiwa-jiwa muslim agar sehat jasmani dan rohani agar dapat menjalankan aktivitas kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan didalam Agama Islam.

3. Demokrasi Pendidikan Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai “Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara” (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1990).



Demokrasi disamping pelaksanaan dan prinsip kesamaan sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok, juga menjadi suatu cara hidup, suatu *way of life* yang menekankan nilai individu dan intelegensi serta manusia menunjukkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerja sama dan toleransi.

Dalam pendidikan Islam demokrasi menunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada anak didik dalam sewajarnya intelegensi. Kesehatan, dan keberadaan sosial, dan sebagainya. Dengan demikian tampak demokrasi pendidikan Islam merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan dan hak kewajiban serta perlakuan yang sama didalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelolaan pendidikan (Hasbullah, 2012).

Demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas, patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan mengandung tiga hal, yaitu:

1) Rasa Hormat Terhadap Harkat Sesama Manusia

Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan tidak memandang perbedaan antara satu dengan lainnya baik hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati diantara mereka.

2) Setiap Manusia Memiliki Perubahan Kearsaf Pikiran yang Sehat

Dari acuan prinsip inilah timbul pandangan manusia itu harus dididik, karenanya sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis dan komprehensif serta kritis sehingga anak atau peserta didik tadi memiliki wawasan, kemampuan dan kesempatan yang luas. Tentunya dalam proses seperti ini diperlukan sikap yang demokratis dan tidak terjadi pemaksaan pandangan terhadap orang lain. Sikap dalam pendidikan untuk mengajak setiap orang berfikir lebih sehat seperti inilah akan melahirkan warga negara yang demokratis di pemerintahan yang demokrasi.

3) Rela Berbakti Untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Bersama

Demokrasi di sini tidaklah berarti setiap orang dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Atau dengan kata lain bahwa



seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Karenanya warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati dan juga orang lain tentunya dapat merasakan kebebasan yang didapat setiap warga negara dari suatu negara yang demokrasi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya akan dapat tercapai apabila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama inilah pilar penyangga demokrasi yang dengan selalu menggunakan dialog dan musyawarah sebagai pendekatan sosialnya dalam setiap pendidikan kewarganegaraan negara dan ketatanegaraan menjadi penting dan sesuatu yang tidak bisa diabaikan keputusan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan tersebut (Fuad Ihsan, 2013).

Dalam Pandangan Islam demokrasi tidak dapat tergambar wujudnya kecuali sudah terhimpun dalam satu kesatuan, tiga unsur pokok yaitu: *Persamaan, tanggung jawab dan tegaknya hukum berdasarkan syura* dan atas dasar peraturan perundangan yang jelas. Karena itu tidak berlebihan jika cendekiawan mesir, Abbas Mahmud al-Aqqad dalam bukunya *Al-Dimokratiyah fi al-Islam* yang dikutip oleh M.Quraish Shihab menyatakan bahwa: ide demokrasi dibentuk pertama kali dalam sejarah dunia oleh ajaran Islam (Shihab, 2010).

Sebagaimana dijelaskan dalam berkaitan dengan persamaan derajat antara semua manusia, Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat (49):13) (Standar Kamenag RI, 2019).



lalu, adanya dalil al-Qur'an yang menegaskan tentang tanggung jawab pribadi manusia, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٠﴾

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (At-Thur (52): 21) (Standar Kamenag RI, 2019).

Al-Qur'an juga menegaskan mengenai kewajiban menegakkan hukum, walau terhadap keluarga sendiri, bahkan perlunya berlaku adil walau terhadap siapa yang dibenci sekalipun, sebagaimana Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَآءُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah(5):8). (Standar Kamenag RI, 2019).

Jika ketiga prinsip dasar diatas itu dapat terwujud dalam pengaplikasian disuatu masyarakat, maka tonggak demokrasi dipancarkan. Demokrasi berubah menjadi positif dan terjaga apabila tetap bersandar pada nilai kerohanian yang menjadi kebenaran yang mutlak. Maka, secara umum adanya bentuk demokrasi dalam pendidikan Islam dapat menciptakan sebuah defenisi yang konkret. Sebuah usaha organisasi atau badan pendidikan dalam mewadahi dengan mewujudkan semua elemen pentik baik dalam sarana, pendidik hingga peserta didik menjadi kesatuan yang dapat menciptakan cita-cita bangsa maupun ajaran Islam (Muhammad Nizar, dkk, 2018).

B. Prinsip – Prinsip Demokrasi dalam Pendidikan Islam



Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap Pendidikan Islam (Muhammad Royhan Daulay, 2017). Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu berkaitan dengan masalah-masalah antara lain:

- a. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan
- b. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan
- c. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.

Dari prinsip-prinsip tadi dapat dipahami ide dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam, pikiran, sifat dan jenis masyarakat dimana mereka berada, karena dalam kenyataannya bahwa pengembang demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan penghidupan masyarakat.

Apa bila pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan yang berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi tadi berarti selalu memperhatikan prinsip-prinsip:

- 1) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan nilai leluhurnya.
- 2) Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermanfaat dan berbudi pekerti luhur.
- 3) Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadi dalam rangka mengembangkan kresninya kearah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merugikan orang lain (H.M Djumberansjah Indar, 1994).

Dalam pandangan Islam prinsip demokrasi yaitu jelas konsep pengertiannya dengan konsep di barat dan di timur dan sebagainya. Rumusan demokrasi dalam pandangan Islam acuanya yaitu sumber ajaran Islam berupa al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan sebagai prinsip dasar dalam berdemokrasi.

Namun dalam prakteknya ternyata demokrasi telah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang dikenal dengan istilah musyawarah. Salah satu contoh dapat dikemukakan bahwa ketika Nabi Muhammad Saw menghadapi masalah strategi perang dan diplomasi dengan musuh, tergambar jelas bagaimana Nabi Muhammad menyelesaikan masalah sosial politik yang sedang dihadapi dan beliau selalu aspiratif dan dapat



mentolierir adanya perbedaan pendapat antara para sahabat, tidak terkecuali berhadapan dengan musuh.

Dengan kata lain Nabi Muhammad Saw tidak menentukan suatu sistem, cara dan metode musyawarah secara baki, tetapo lebih bersifat variatif, fleksibel dan adaptif. Firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Standar Kamenag RI, 2019).

Ayat diatas ditunjukan kepada Nabi Muhammad SAW agar bermusyawarah dalam persoalan –persoalan yang dihadapi dengan para sahabatnya atauu anggota masyarakat. Dari monsep sejarah tersebut ada nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi yang menjadi prinsip dasar demokrasi. Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip-prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik
 - a) Kebebasan berkarya
 - b) Kebebasan dalam mengembangkan potensi
 - c) Kebebasan berpendapat
2. Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam



Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Abudin Nata menyatakan bahwa peserta didik yang masuk dilembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik.

3. Penghormatan akan martabat individu dalam pendidikan Islam

Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain, maksudnya ialah seorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Secara histories prinsip penghormatan akan martabat individu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam praktek pembebasan kaum tertindas di Mekah seperti memerdekakan budak (Ramayulis, 2002).

C. Problematika Demokrasi Pendidikan Islam

Masalah mendasar pendidikan Islam ialah tidak jelasnya paradigma pendidikan Islam. Antara paradigma idiologis dan paradigma ilmiah bercampur sedemikian kompleks sehingga berkembang kemudian adalah paradigmaideology ilmiah atau pseudo ilmiah. Akibatnya, tradisi pemikiran ilmiah yang kreatif, dinamis, dan terbuka dalam tradisi Islam sebagaimana hakikat wahyu benar-benar sulit berkembang (Abdul Munir, 2018).

Demokrasi dalam pendidikan Islam memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, dimana pengelolaan pendidikan akan banyak di tentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelola, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi, sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Disisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efesiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat.

Metode pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam sebenarnya banyak terpengaruh oleh prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam sendiri sejak kelahirannya selalu menyerukan adanya prinsip kebebasan dan persamaan dalam belajar, sehingga terbukalah jalan untuk belajar bagi semua orang, pintu masjid dan institute-institute terbuka untuk semua orang, tanpa memandang perbedaan antara si kaya dan si miskin, tinggi atau rendahnya kedudukan social seorang siswa, oleh karena didalam Islam tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan arab, kecuali dari taqwanya (M. Athiyah, 2015).

Dalam menciptakan pendidikan Islam yang lebih demokratis dan dalam rangka menghadapi perubahan masyarakat global, ada beberapa



persoalan mendasar internal pendidikan Islam yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu: *Pertama* harus mengikis habis wawasan sejarah pendidikan Islam yang tidak sesuai dengan gagasan yang di bawa Al Qur'an, berupa persoalan dikotomik pendidikan Islam yang merupakan persoalan mendasar dari perkembangan pendidikan Islam selama ini. Pendidikan Islam harus di jauhkan dari dikotomik, menuju pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama. Berkaitan dengan hal tersebut, yang pertama kali harus di lakukan adalah kemandirian dalam segala aspek. Dengan kemandirian tersebut, akan melindungi proses pengembangan pendidikan Islam dari berbagai intervensi yang akan memperkosa proses pengembangan pendidikan Islam untuk tetap bersiteguh berdiri pada konsep yang murni dari Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk memberdayakan bangsa yang mayoritas muslim ini.

Kedua, perlu pemikiran kembali tujuan dan fungsi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Artinya lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya berorientasi untuk memenuhi keinginan kepentingan akhirat saja dengan mengajarkan keterampilan beribadah saja. Hal tersebut masih di rasakan apabila pendidikan Islam di pandang dari dimensi ritual masih jauh dalam memberikan pengayaan spiritual, etika dan moral ilahiyah.

Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus menjadikan pendidikannya tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu agama [spiritual *ilahiyah*], ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan atau kemahiran, seni dan budaya serta etika dan moral *ilahiyah*. Selain persoalan tersebut, pendidikan Islam sekarang ini juga di hadapkan pada persoalan-persoalan yang cukup kompleks, yakni bagaimana upaya untuk membangun paradigma baru pendidikan, manajemen dan organisasi, metode pembelajaran untuk dapat mempersiapkan manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat global yang begitu cepat, sehingga produk pendidikan Islam tidak hanya melayani dunia modern, tetapi mempunyai pasar baru atau mampu bersaing secara kompetitif dan proaktif dalam dunia masyarakat modern, global dan informasi (Siti Romlah, 2018).

D. Solusi Demokrasi Pendidikan Islam

Perubahan yang perlu di lakukan pendidikan Islam, yaitu:

1. Membangun sistem pendidikan Islam yang mampu mengantisipasi kemajuan iptek untuk menghadapi tantangan dunia global menuju masyarakat Indonesia baru yang dilandasi dengan nilai-nilai ilahiyah, kemanusiaan, dan masyarakat, serta budaya.



2. Menata manajemen pendidikan Islam dengan berorientasi pada manajemen berbasis sekolah agar mampu menyerap aspirasi masyarakat, yang dapat mendayagunakan potensi masyarakat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas.
3. Meningkatkan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan Islam secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menggali serta mendayagunakan potensi masyarakat (Siti Romlah, 2018).

Dari uraian diatas, menegaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mendisain model-model pendidikan alternatif yang lebih demokratis yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini.

E. Analisis Pengembangan Demokrasi Pendidikan Islam

Menurut Abdurrahman saleh Abdullah, pendidikan tidak dipandang sebagai proses pemaksaan dari seorang pendidik untuk menentukan setiap langkah yang harus diterima oleh peserta didiknya secara individual dengan demikian dalam proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan tersebut.

Dalam proses pembelajaran harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan syarat dengan perintah dan instruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan. Islam menyerukan praktek persamaan dan peluang yang sama dalam belajar, sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang tanpa adanya perbedaan antara status sosial ekonomi seorang peserta didik, serta tidak pula gender.

Dalam praktek demokrasi pendidikan Islam pada masa dahulu kata atiyah adalah partisipasi aktif masyarakat untuk mendirikan mesjid-mesjid, institut-institusi dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan sebagai sarana belajar, sehingga memungkinkan siswa yang kurang mampu meneruskan pelajarannya serta melanjutkan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi (Ramayulis, 2015).

DISKUSI



1. paradigma pendidikan yang mengarah pada era demokrasi banyak memberikan konsekuensi logis dalam mempersiapkan kondisi masa transisi budaya. Masyarakat yang mengalami situasi demokrasi umumnya lebih menghargai perbedaan pandangan dan keberagaman status sosial. Demokrasi pendidikan tidak terlepas dari peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan sasaran kualitas yang diinginkan.
2. Demokrasi pendidikan Islam dipengaruhi oleh suatu kondisi pluralisme masyarakat yang memiliki heterogenitas linguistik, budaya, dan letak geografis sehingga keseragaman pola pendidikan yang pernah dilakukan pada pemerintah orde baru sangatlah tidak tepat, sehingga akan menciptakan karakter bangsa yang serba seragam. Oleh karenanya, pada era reformasi, demokrasi pendidikan mengalami pergeseran paradigma ke arah keberagaman. Bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda untuk dikembangkan, serta adanya komitmen terhadap pengakuan kebebasan berpikir, pendidikan Islam sebaiknya mencoba memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan kualitas kemampuan peserta didik serta pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam demokrasi pendidikan Islam adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, rendahnya inisiatif kebijakan demokratis, serta tantangan era globalisasi. Adapun sintesis dan analisis yang diambil sebagai prinsip dasar pelaksanaan demokrasi pendidikan Islam adalah adanya kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara, adanya arah kebijakan dilandasi oleh prinsip button-up, adanya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, berlakunya prinsip transparansi dan akuntabilitas public.
4. Berbagai masalah serta hasil analisis dan sintesis, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menumbuhkan demokrasi diperlukan suatu pendidikan yang turut menunjang peningkatan kualitas masyarakat yang dapat memahami budaya demokrasi, serta pendidikan yang demokratis sangat ditunjang oleh system kenegaraan yang demokratis.

KESIMPULAN

Pada kondisi Negara yang memiliki masyarakat heterogenitas, cenderung menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Konteks demokrasi secara sederhana menunjukkan adanya pemerintahan dan rakyat oleh rakyat. Prinsip utama dalam menerapkan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual



terhadap upaya untuk menikmati hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara sehingga pada gilirannya dapat membentuk kondisi community development pada nilai-nilai keberagamaan, baik berpikir, bertindak berpendapat maupun berkreasi agar semakin demokratis pelaksanaan pendidikan suatu negara akan memberikan implikasi pada pendidikan paraf kepedulian masyarakat terhadap hak dan kepeduliannya. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang paling banyak dianut pada masa ini. Saat ini, banyak sekali Negara yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi sendiri berarti sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hukum. Dalam Islam, demokrasi telah diajarkan Rasulullah SAW. Yaitu dengan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwyan Syah, dkk. *Penggunaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam.*, Jakarta: aza Media, 2006
- Daulay Muhammad Royhan, *Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Islam*, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol.03 No. 1 Juli 2017
- Departemen Pendidikan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 1990
- H.M Indar Djumberansjah, *Filsafat Pendidikan*, Surabaya: Karta abditama, 1994
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pres 2012
- Ihsan Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- M. Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*
- Moesa Ali Maschan, *NU, Agama dan Demokrasi*. Surabaya: Pustaka Dai Muda, 2002
- Nizar Muhammad dan Muhammad Tafrihuiddin, *Pendidikan Islam dan Demokrasi*, Jurnal Stai-yaptip
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2002
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2015
- Romlah Siti, *Demokrasi Pendidikan Islam*, Pascawahana: Jurnal Studi Islam, Vol 13, No.2 , Desember 2018
- Rosyada Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Jakarta: Pustaka Media, 2005
- Shihab, *Membumikan al-Qur'an Jilid 2*, Lentera Hati, 2010
- Standar Kamenag RI, *Mushaf Tajwid Warna dan Terjemahan*, Wonogiri: Insan Mulia Kreasi, 2019



